

STRATEGI DAN TANTANGAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KOTA AMBON

Eka Dahlan Uar

Dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email : ekauar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota tak terkecuali di kota Ambon. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain, perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota. Selain itu pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana bentuk dan kondisi kawasan kumuh di Kota Ambon serta Bagaimana Pola Penanganan Kawasan Kumuh tersebut. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi secara keseluruhan.

Hasil temuan pemukiman di Kota Ambon tercatat memiliki luas wilayah kumuh 102,64 hektar. Kota Ambon sendiri 15 titik wilayah kumuh tersebut terdapat di wilayah Ahusen dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Amantelu dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Meja dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Merah dengan klasifikasi kumuh berat. Kelurahan Benteng dengan klasifikasi kumuh sedang, Honipopu dengan klasifikasi kumuh sedang, Karang Panjang dengan klasifikasi kumuh sedang, Kudamati dengan klasifikasi kumuh sedang, Pandan Kasturi dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Rijali dengan klasifikasi kumuh berat. Kelurahan Silale dengan klasifikasi kumuh sedang, Urimesing dengan klasifikasi kumuh sedang, Uritetu dengan klasifikasi kumuh sedang, Waihaong dengan tingkat kumuh sedang, dan Wainitu dengan tingkat kumuh sedang.

Penanganan kawasan kumuh di Ambon yakni pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, seperti pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan. Selain itu pembangunan berbagai sarana prasarana pengelolaan air limbah seperti septi tank komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK) serta instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT). "Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial

budaya maupun pelatihan keterampilan kerja dan sosialisasi guna peningkatan kapasitas,"

Katakunci : Penanganan, Kumuh

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, merupakan penyebab utama pesatnya perkembangan kegiatan suatu kota. Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur kota. Perubahan tersebut akan mengarah pada kemerosotan suatu lingkungan permukiman, tidak efisiennya penggunaan tanah kawasan pusat kota, dan mengungkapkan bahwa penurunan kualitas tersebut bisa terjadi di setiap bagian kota. Kemerosotan lingkungan seringkali dikaitkan dengan masalah sosial, seperti kriminalitas, kenakalan remaja, dan prostitusi (Sujarto, 1980:17).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Perkembangan pembangunan di Kota Ambon seperti di perkotaan lain di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan di semua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipacu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah (Dwyangga, 2009). Berdasarkan data Bappeda Provinsi Maluku tahun 2014, teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kota Ambon dengan luas 102,64 Ha. Kota Ambon tercatat memiliki 15 titik wilayah kumuh, Lokasi-lokasi itu adalah di Waihaong dengan luas 5,34 hektar wilayah kumuhnya, Rijali (6,5 hektar), Silale (2,39 hektar), Urimesing (6,28 hektar), Uritetu (7,38 hektar), dan Wainitu (7,89 hektar). (<http://ambonekspres.com>).

Untuk mewujudkan program penanganan permukiman kumuh di Kota Ambon perlu pendekatan yang tidak hanya fokus terhadap pendekatan fisik namun perlu memperhatikan pendekatan terhadap karakteristik penghuni (masyarakat) yang tinggal dikawasan permukiman kumuh, karakteristik hunian, karakteristik prasarana pendukung perumahan penunjang dan karakteristik spasial permukiman kumuh tersebut untuk melihat faktor penyebab permukiman kumuh secara menyeluruh sehingga solusi yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Kota Ambon. Oleh sebab itu penting dilakukan penelitian untuk melihat karakteristik, faktor penyebab dan

pola penanganan permukiman kumuh yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Kota Ambon.

Bertolak dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk dan kondisi Kawasan Kumuh di Kota Ambon ?, 2) Bagaimana Pola Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon ?

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan pemukiman Kumuh telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya Suartini Eny Endang tahun 2006, yang meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kawasan Pemukiman Kumuh di Pusat Kota Studi pada Kawasan Pancuran Salatiga, menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kawasan Pancuran menjadi kumuh adalah faktor tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat direkomendasikan upaya perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan Pancuran ke arah yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah penataan kawasan melalui pembangunan RUSUNAWA.

Hasil penelitian lainnya adalah berupa ciri-ciri dari masyarakat kampung kota, persepsi tentang kualitas lingkungan yang buruk, kategori kebutuhan akan rumah pada masyarakat kampung kota berada, bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan, faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap partisipasi, inovasi sosial berbasis masyarakat, strategi proses penyadaran masyarakat.

Penelitian ini merupakan tesis dari Tety Juliany Siregar pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepedulian masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai. Adapun sasarannya mengkaji keberhasilan perubahan perilaku masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ini kualitatif diawali pendekatan positivistik, yaitu dengan cara berpikir dari depan dengan melihat dan mengkaji variabel-variabel penelitian berdasarkan kajian literatur secara komprehensif kemudian variabel-variabel tersebut dianalisis pada fenomena yang terjadi di lapangan.

Dari penelitian terdahulu yang telah dikemukakan tersebut di atas tidak melihat pola penanganan yang akan dilakukan oleh pemegang kepentingan, sehingga dengan demikian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pola penanganan dan pemberdayaan bagi masyarakat di kawasan kumuh.

C. Landasan Konseptual

McAndrew dkk. (1983) mengemukakan bahwa kata permukiman merupakan terjemahan kata-kata land settlement dan resettlement dan biasanya dikaitkan dengan

kata-kata yang mempunyai arti sama yaitu *scheme* dan *project*. Pada hakekatnya permukiman adalah hidup bersama, sebab itu fungsi rumah dalam kehidupan manusia adalah sebagai tempat tinggal yang diperlukan oleh manusia untuk memasyarakatkan dirinya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai suatu sosial ekonomi dan fisik ke tata ruang, lingkungan, sasaran umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudayakan sumber-sumber daya dan dana, mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tentram, nikmat dan sejahtera dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk dapat menilai bahwa suatu permukiman sehat atau tidak perlu didasarkan pada karakteristik daerah permukiman yang merupakan standar yang telah disepakati.

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Gambaran seperti itu diungkapkan oleh Herbert J.Gans dengan kalimat:

"Obsolescence per se is not harmful and designation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards and middle class incomes".

Menurut Soemadi (1990) terjadinya permukiman kumuh karena besarnya arus urbanisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Lebih jauh dikemukakan bahwa perkampungan kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunan-bangunan yang ada tidak memenuhi syarat serta didiami oleh orang miskin, serta fasilitas tempat pembuangan sampah maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Ciri-ciri lain permukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana dan infrastruktur kota sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, tingkat pendidikan rendah, pendapatan rumah tangga dan pendapatan penduduk rendah, serta kebanyakan bekerja di sektor informal. Dalam keadaan seperti ini mengakibatkan tingkat berfikir dan daya kreasi yang kurang dan sulit menerima sesuatu yang baru seperti pembangunan ke arah perbaikan lingkungan permukiman itu sendiri (Hurlock, 1972).

Dari kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan) saja masih sulit dipenuhi oleh masyarakat permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan oleh pendapatan yang rendah sehingga rumah murahpun sulit mereka miliki. Untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat permukiman kumuh mereka membuat rumah darurat dari bahan-bahan seadanya misalnya papan bekas, karton, seng bekas dan sebagainya.

Apabila diperhatikan lebih jauh tentang ciri perwakilan kumuh yang secara menyeluruh lingkungan ini nampak jelas perbedaannya dengan lingkungan hunian lainnya. Soemadi (1990) mengemukakan beberapa ciri yang menonjol dan suatu permukiman kumuh adalah sebagai berikut : Penduduknya sangat padat serta jumlah anak juga besar dan kurang terurus dengan baik.

D. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi secara keseluruhan. (John W. Creswell-Research Design, 2002). Penelitian ini di Kota Ambon karena Kota Ambon adalah ibu kota Provinsi Maluku yang terletak pada posisi lintang utara, dengan luas 102,64 Ha, dan terdapat empat Kecamatan. Kota Ambon tercatat memiliki 15 titik wilayah kumuh, Lokasi-lokasi itu adalah di Waihaong dengan luas 5,34 hektar wilayah kumuhnya, Rijali (6,5 hektar), Silale (2,39 hektar), Urimesing (6,28 hektar), Uritetu (7,38 hektar), dan Wainitu (7,89 hektar). Sehingga penelitian ini akan dilakukan pada lokasi-lokasi sebagaimana dikemukakan di atas.

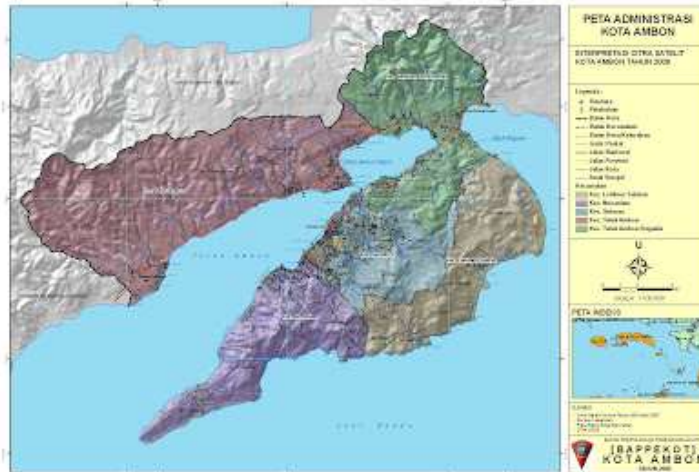
Subyek penelitian ini adalah masyarakat dalam wilayah administrasi Kota Ambon terutama yang berada di wilayah pemukiman Kumuh yakni Waihaong, Urimesing, Rijali Desa Batu Merah, Silale, Uritetu dan Wainitu yang mengalami secara langsung kondisi kekumuhan, mendiami, merasakan, dan mengetahui tentang Kondisi Kekumuhannya. Adapun penentuan sumber data yang diambil dalam studi ini ditentukan dengan menggunakan Metode kualitatif, sehingga sumber data yang akan diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dan mendalam dengan masyarakat yang beradap ada wilayah kumuh yang di diami serta Pemerintah Daerah Kota Ambon sebagai pengambil Kebijakan di Daerah ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: dokumentasi, observasi terlibat dan wawancara mendalam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dari hasil survey dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi untuk melihat karakteristik permukiman kumuh di Kota Ambon, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengelompokkan faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan dan perumusan model penanganan yang sesuai dengan karakteristik dan faktor yang diduga penyebab kekumuhan pada kawasan studi

E. Gambaran Umum Wilayah

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon, adalah sebuah kota yang terletak di pulau kecil, dan merupakan ibukota Provinsi Maluku. Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3° - 4° Lintang Selatan dan 128° - 129° Bujur Timur. Wilayah administratif Kota Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, mempunyai luas sebesar 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah

Pulau Ambon. Berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 luas daratan Kota Ambon adalah 359,45 km², sehingga luas Kota Ambon ini meliputi daratan seluas 359,45 Km² dan laut seluas 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km (Peta 1). Dimana secara umum Kota Ambon meliputi wilayah di sepanjang pesisir dalam Teluk Ambon dan pesisir luar Jazirah Leitimur dengan total panjang garis pantai 102,7 Km.



Kota Ambon terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Nusaniwe, Sirimau, T.A. Baguala, Leitimur Selatan, dan Teluk Ambon. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan atau desa/negeri. (Tabel 1). Karena bentuk wilayah Kota Ambon yang memanjang di sepanjang pesisir, maka Kelurahan adalah kawasan perkotaan (urban area), sedangkan Desa/Negeri adalah kawasan non perkotaan/kawasan perdesaan dan/atau kawasan yang masih terpelihara nilai sosial budaya masyarakat setempat. Gambaran selengkapnya tentang nama Kelurahan/Desa/Negeri beserta jumlah RT/RW dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan, dan Jumlah Kelurahan di Kota Ambon

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah Daratan (Km ²)
			Desa/Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A. Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
Kota Ambon			30	20	359,45

Pulau Ambon di mana terletak Kota Ambon berada adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan

berlereng terjal. Sebesar 73% dari luas wilayahnya dapat dikategorikan berlereng terjal, dengan kemiringan di atas 20%. Hanya 17% dari wilayah daratannya yang dapat diklasifikasikan datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20%.

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
- Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).
- Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.
- Topografi terjal dengan ketinggian > 100 meter dan kemiringan > 30% terdapat pada kawasan pegunungan.

Pada Wilayah-Wilayah DAS, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, melalui Area Penggunaan Lain untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Sebagai gambaran, untuk Wilayah DAS Wae Batu Merah, APL mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-sungai utama, yang jika tidak diantisipasi, dapat berdampak buruk di kemudian hari.

Tabel 2.
Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1.	Wilayah DAS Wae Batu Merah	7940,27
	a. DAS Wae Tomu	1 564,00
	b. DAS Wae Batu Gajah	545,75
	c. DAS Wae Batu Gantung	1.729,32
	d. DAS Wairuhu	1.080,00
	e. Area Penggunaan Lain (APL)	4.021,20
2.	Wilayah DAS Wae Pia Besar	13.609,29

Sumber: Program Studi Ilmu Tanah Universitas Pattimura, 2012

Ketersediaan air tanah di Kota Ambon dapat dikelompokkan atas: (1) ketersediaan rendah yang umumnya berada di perbukitan; (2) ketersediaan sedang di dataran rendah dan pesisir; serta (3) ketersediaan tinggi di beberapa tempat tertentu seperti di Negeri Tawiri, Desa Waiheru, pesisir Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, dan Negeri Urimesing. Sepanjang pesisir merupakan daerah dengan akuifer berproduksi baik, namun bukan merupakan daerah resapan yang potensial, sehingga ketersediaan air tanahnya adalah sedang.

Kondisi umum Iklim dan Curah Hujan Iklim di Kota Ambon adalah iklim tropis dan iklim musim, karena letak Pulau Ambon dikelilingi oleh laut. Sehubungan dengan itu iklim Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat.

Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2011, berdasarkan data BPS Kota Ambon berjumlah 340.428 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk meningkat sebesar 2,77 persen. Penduduk tahun 2011, terdistribusi pada kecamatan Sirimau sebanyak 143.943 jiwa (42,28%) dengan kepadatan 1.658 jiwa/km² , kecamatan Nusaniwe sebanyak 92.355 jiwa (17,13%) dengan kepadatan 1.045 jiwa/km² , kecamatan Teluk Ambon Baguala sebanyak 54.953 jiwa (16,14%) dengan kepadatan 1.370,05 jiwa/km² , kecamatan Teluk Ambon sebanyak 39.516 jiwa (11,61%) dengan kepadatan 421 jiwa/km² , dan kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 9.661 jiwa (2,84%) dengan kepadatan 191 jiwa/km² . Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2011 adalah 947 jiwa/km² . adapun jumlah penduduk terakhir tahun 2014 sesuai data BPS dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

F. Bentuk dan kondisi Kawasan Kumuh di Kota Ambon

1. Kota Ambon ; Wilayah Terkumuh di Maluku

Kota Ambon menjadi kota terkumuh di Maluku dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku dengan 15 lokasi kumuh yang menyebar di Kota Ambon. Berdasarkan data presentasi yang disampaikan Bappeda Provinsi Maluku dalam Lokakarya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (16/9), Kota Ambon tercatat memiliki luas wilayah kumuh 102,64 hektar. Kota Ambon sendiri 15 titik wilayah kumuh tersebut terdapat di wilayah Ahusen dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Amantelu dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Meja dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Merah dengan klasifikasi kumuh berat.



“Pemandangan Kawasan Kumuh di Sungai Pasar Batumerah – Mardika”

(Salah satu Pemukiman Kumuh di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau)

Kelurahan Benteng dengan klasifikasi kumuh sedang, Honipopu dengan klasifikasi kumuh sedang, Karang Panjang dengan klasifikasi kumuh sedang, Kudamati dengan klasifikasi kumuh sedang, Pandan Kasturi dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Rijali dengan klasifikasi kumuh berat. Kelurahan Silale dengan klasifikasi kumuh sedang, Urimesing dengan klasifikasi kumuh sedang, Uritetu dengan klasifikasi kumuh sedang, Waihaong dengan tingkat kumuh sedang, dan Wainitu dengan tingkat kumuh sedang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bertekad menuntaskan kawasan kumuh pada tahun 2019 melalui Program 100-0-100, yakni 100 persen pelayanan air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans, mengatakan bahwa penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah kota. "Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kawasan kumuh masih bekerja ekonomi nonformal atau di sektor informal. Pemerintah bertekad akan menuntaskan kawasan kumuh pada tahun 2019 melalui Program 100-0-100 saat lokakarya koordinasi penanganan kawasan kumuh (Lokakarya NKK) yang dilaksanakan pada 12-13 Desember 2018. Strategi komunikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program 100-0-100 adalah strategi komunikasi berbasis masyarakat (SBM)."

Menurut Frans, penanganan kawasan kumuh akan dilakukan melalui form kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program tersebut, kata Frans, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh, menuju kota layak huni dan berkelanjutan. "Tujuannya adalah terciptanya kondisi lingkungan yang ideal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam konsepsi pembangunan yang menitikberatkan pada pencapaian target 100-0-100," katanya.



(Salah



su kecamatan

Ia menjelaskan penanganan kawasan kumuh di Ambon yakni pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, seperti pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan. Selain itu pembangunan berbagai sarana prasarana pengelolaan air limbah seperti septi tank komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK) serta instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT). "Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial budaya maupun pelatihan keterampilan kerja dan sosialisasi guna peningkatan kapasitas," katanya. Ia mengaku guna mengefektifkan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh perlu diperhatikan dua hal yakni seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan langkah koordinatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan antarpemerintah pusat, daerah, swasta serta unsur masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan penanganan menganut pola tri daya yakni penataan prasarana dan sarana lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan. "Perbaikan lingkungan pemukiman secara fisik saja tidak berarti jika tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup manusia secara ekonomi dan sosial budaya," kata Frans.



(dalam Sirimau)

Ratusan rumah tidak layak huni di Kota Ambon, ibu kota Maluku, akan direhabilitasi pemerintah melalui program Pembenahan 15 Kawasan Kumuh. Kawasan yang menjadi prioritas rehabilitasi tahun 2016 yakni Negeri Batu Merah 200 unit rumah, Kelurahan Amantelu 50 unit, Kelurahan Rijali 50, Desa Urimessing 30 dan Kelurahan Hunipopu 100 unit. Dilansir dari Kantor Berita Antara, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Kawasan Perkotaan Dinas Tata Kota Ambon Roy Mongie, Kamis menyatakan, pihaknya segera menindaklanjuti program tersebut setelah data verifikasi dari Pemerintah Provinsi Maluku diterima. "Kami telah mengusulkan kepada Pemprov Maluku untuk melakukan verifikasi dan berapa jumlah rumah yang akan disetujui, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembangunan rumah di kawasan kumuh secara bertahap," katanya. Menurut dia, besaran anggaran perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dibagi atas tiga bagian yakni rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. "Untuk rumah rusak berat satu rumah disiapkan anggaran sebesar Rp15

juta, rumah rusak sedang Rp10 juta dan rusak ringan Rp7,5 juta menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujarnya.

Roy menjelaskan, rehabilitasi rumah kumuh merupakan program strategis pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya yang ditargetkan tercapai pada 2019. Tahun 2019 sejumlah program ditargetkan mencapai 100-0-100, yakni 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses terhadap sanitasi sehat. “Saat ini di Ambon program tersebut telah berjalan, sejumlah desa kelurahan yang menjalankan program seperti Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yakni di Kelurahan Wainitu dan Waihaong oleh PNPM Mandiri Perkotaan,” katanya. Ia menambahkan, tahun 2016 pihaknya akan melakukan perbaikan sejumlah rumah yang dinilai tidak layak huni untuk diperbaiki, tetapi hanya beberapa desa kelurahan. Diharapkan tahun 2017 desa kelurahan yang belum mendapat giliran dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan. “Kami sangat berharap agar program ini segera telaksana sehingga di tahun 2019 mendatang, seluruh Indonesia termasuk Kota Ambon tidak ada lagi kawasan kumuh,” kata Roy.

2. Area Beresiko Kumuh

Area beresiko tinggi sampah di Kota Ambon terdapat pada 4 desa/negeri/kelurahan (8%), yaitu Kelurahan Waihoka, Desa Waiheru, Desa Hunuth, dan Negeri Rumah Tiga. Keempat desa/negeri/kelurahan terlayani merupakan jalur pelayanan sampah Kota Ambon, namun berada di luar Pusat Kota Ambon. Pada sisi lain terdapat 37 desa/negeri/kelurahan (74%) tersebar di semua kecamatan, merupakan area beresiko sedang sampah, yang perlu penanganan lebih lanjut. Sedangkan resiko menengah sampah terdapat 9 desa/negeri/kelurahan (18%), yaitu 7 Kelurahan (Wainitu, Mangga Dua, Silale, Amantelu, Uritetu, Honipopu dan Lateri), dan 2 Desa yaitu (Galala dan Negeri Lama). Kesembilan desa/kelurahan dimaksud sebagian besar tersebar di Pusat Kota Ambon yang merupakan kawasan pelayanan sampah yang intens.

Area beresiko tinggi drainase di Kota Ambon terdapat pada 6 desa/negeri/kelurahan (12%), yaitu Negeri Seilale, Kelurahan Waihaong, Kelurahan Silale, Negeri Batu Merah, Negeri Passo, dan Desa Waiheru. Beberapa kawasan yang beresiko tinggi terhadap drainase tersebut dilalui oleh sungai-sungai utama, yaitu sungai Batu Merah (Negeri Batu Merah), sungai Batu Gantung (Kelurahan Waihaong), sungai Batu Gajah (Kelurahan Silale), sungai Waiheru (Desa Waiheru), dan kanal Passo (Negeri Passo). Selain itu beberapa kawasan sering tergenang ketika rob (air laut pasang) yaitu Kelurahan Waihaong dan Kelurahan Silale. Sementara Negeri Passo, secara topografi berada beberapa sentimeter dibawah permukaan laut, sehingga aliran drainase sering lambat dan tergenang, dan jika musim hujan, sering terjadi genangan dalam jangka waktu lebih dari 3 jam. Pada sisi lain terdapat 10 desa/negeri/kelurahan (20%), merupakan area beresiko sedang

drainase, yang perlu penanganan lebih lanjut. Sedangkan resiko menengah drainase terdapat di 34 desa/negeri/kelurahan (68%), yang tersebar di semua kecamatan.

Adapun area beresiko tinggi air bersih di Kota Ambon terdapat pada 4 negeri (8%), yaitu Negeri Urimessing, Negeri Naku, Negeri Kilang, dan Negeri Ema. Keempat negeri ini merupakan desa/negeri di pegunungan. Pada negeri Urimessing sebenarnya terdapat sumber mata air yang dipergunakan sebagai sumber air baku PDAM yaitu Air Keluar di Dusun Urimessing, maupun sumber air di Dusun Seri, namun karena wilayah Negeri ini cukup luas (4.616 ha), yang merupakan bukit-bukit dan gunung, sehingga tidak semua permukiman mempunyai jaringan air bersih yang memadai. Pada sisi lain terdapat 25 desa/negeri/kelurahan (20%) tersebar di semua kecamatan, merupakan area beresiko sedang air bersih, yang perlu penanganan lebih lanjut. Sedangkan resiko menengah air bersih terdapat di 21 desa/negeri/kelurahan (42%), yang tersebar di semua kecamatan.

Sementara berdasarkan penilaian resiko terhadap komponen sanitasi di atas, yaitu PHBS, Sampah, Air Limbah, Drainase, dan Air Bersih, ternyata semua wilayah desa/negeri/kelurahan beresiko sanitasi, yaitu resiko tinggi dan resiko sedang sanitasi. Area beresiko tinggi sanitasi tersebar di semua kecamatan, pada 13 desa/negeri/kelurahan (26%). Pada Kecamatan Nusaniwe tersebar di Negeri Seilale, Kelurahan Urimessing, dan Kelurahan Waihaong. Pada Kecamatan Sirimau tersebar di Negeri Batu Merah, Kelurahan Uritetu, dan Kelurahan Waihoka. Pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala tersebar di Negeri Passo, dan Desa Waiheru. Pada Kecamatan Leitimur Selatan tersebar di Negeri Naku, Negeri Kilang, dan Negeri Ema. Pada Kecamatan Teluk Ambon tersebar di Desa Hunuth dan Desa Poka.

Desa/negeri/kelurahan lainnya sejumlah 37 desa/negeri/kelurahan (74%) merupakan area beresiko sedang sanitasi, yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusaniwe pada 10 desa/negeri/kelurahan, Kecamatan Sirimau pada 11 desa/negeri/kelurahan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala pada 5 desa/negeri/kelurahan, Kecamatan Leitimur Selatan pada 5 desa/negeri/kelurahan, dan Kecamatan Nusaniwe pada 6 desa/negeri/kelurahan.

G. Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kota Ambon

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278). RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 secara substantif terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon.

2. Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon meliputi:

- a. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP);
- b. Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota; dan
- c. Sistem Jaringan Prasarana.

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) direncanakan meliputi:

- a. SWP I, seluas 4.259,67 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Sirimau;
- b. SWP II, seluas 7.164,83 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Teluk Ambon-Baguala;
- c. SWP III, seluas 7.051, 76 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Teluk Ambon;
- d. SWP IV, seluas 6.513,10 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Leitimur Selatan;
- e. SWP V, seluas 4.042,92 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Nusaniwe; dan
- f. Kawasan khusus pengamanan bandar udara seluas 6.912,72 ha, yang meliputi wilayah Negeri Tawiri dan Negeri Laha.

Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota direncanakan meliputi: (a) lokasi pusat-pusat pelayanan kegiatan kota; (b) hirarki pusat-pusat pelayanan kegiatan kota; (c) cakupan/skala pelayanan kegiatan kota; dan (d) dominasi fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan kota. Cakupan dan/atau skala pelayanan setiap pusat kegiatan pelayanan kota dan rencana pengembangannya meliputi:

- a. Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama SWP I;
- b. Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur, terutama SWP II;
- c. Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III;
- d. Negeri Amahusu sebagai Sentra tersier I, direncanakan melayani SWP V
- e. Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II, direncanakan melayani SWP IV;
- f. Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; serta
- g. Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan kawasan khusus Bandar udara.

Dominasi fungsi kegiatan yang direncanakan untuk pusat-pusat pelayanan meliputi:

- a. Pusat Kota Ambon, bersama SWP I direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut,

industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional;

- b. Negeri Passo, bersama SWP II direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan, pariwisata, dan pemukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
- c. Desa Wayame, bersama SWP III direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan;
- d. Negeri Leahari-Rutong, bersama SWP IV direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan, permukiman, dan pariwisata;
- e. Negeri Amahusu dan Latuhalat, bersama SWP V direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan pemukiman;
- f. Kawasan khusus pengamanan bandar udara, bersama Negeri Tawiri-Laha direncanakan akan terus dikembangkan sebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara distribusi tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan pertambangan bahan galian golongan C.

3. Rencana Pola Ruang Kota Wilayah Kota Ambon

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) kawasan pelestarian alam; (e) kawasan rawan bencana; (f) kawasan lindung geologi; dan (g) kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi: (a) kawasan permukiman/ dan atau perumahan; (b) kawasan perdagangan dan jasa; (c) kawasan perkantoran; (d) kawasan industri kecil dan menengah; (e) kawasan pariwisata; (f) kawasan ruang terbuka non hijau; (g) kawasan ruang evakuasi bencana; (h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan rawan bencana di Kota Ambon meliputi: (1) kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah, (2) kawasan rawan longsor, (3) kawasan rawan banjir, dan (4) kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami. Kawasan rawan

gempa, dan gerakan tanah meliputi wilayah Kota Ambon. Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Dusun Mahia, Dusun Tuni Negeri Amahusu, Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar, dan Negeri Nusaniwe. Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, dan Wailela. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

4. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kota layak huni, produktif, dan berkelanjutan merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program KOTAKU diterjemahkan dalam dua kegiatan yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (top-down) dengan perencanaan mikro (bottom-up). Pemerintah kabupaten/kota memimpin keseluruhan proses kegiatan penanganan tersebut. Di tingkat kelurahan/desa, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintah kelurahan/desa dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sector oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan berbagai sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya. Melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten/kota di harapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0 ha permukiman kumuh hingga tahun 2019.

Sebagai satu kesatuan sub-sistem wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kelurahan/desa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk meneruskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pembangunan (RPJM/RKP) Desa atau Rencana Strategis/Rencana Kerja (Renstra/Renja) kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman / Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/RTPLP). Perencanaan di tingkat kelurahan/desa tersebut tentunya harus terkoneksi dengan sistim perencanaan penanganan permukiman kumuh kab/kota dan selaras dengan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota

dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Kota Ambon tercatat memiliki luas wilayah kumuh 102,64 hektar. Kota Ambon sendiri 15 titik wilayah kumuh tersebut terdapat di wilayah Ahusen dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Amantelu dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Meja dengan klasifikasi kumuh sedang, Batu Merah dengan klasifikasi kumuh berat. Kelurahan Benteng dengan klasifikasi kumuh sedang, Honipopu dengan klasifikasi kumuh sedang, Karang Panjang dengan klasifikasi kumuh sedang, Kudamati dengan klasifikasi kumuh sedang, Pandan Kasturi dengan klasifikasi kumuh sedang, kelurahan Rijali dengan klasifikasi kumuh berat. Kelurahan Silale dengan klasifikasi kumuh sedang, Urimesing dengan klasifikasi kumuh sedang, Uritetu dengan klasifikasi kumuh sedang, Waihaong dengan tingkat kumuh sedang, dan Wainitu dengan tingkat kumuh sedang.

Pola, rencana dan strategi penanganan kawasan kumuh pemerintahan kota Ambon yakni menuntaskan kawasan kumuh pada tahun 2019 melalui Program 100-0-100, yakni 100 persen pelayanan air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak. Tujuannya adalah terciptanya kondisi lingkungan yang ideal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam konsepsi pembangunan yang menitikberatkan pada pencapaian target 100-0-100. Penanganan kawasan kumuh di Ambon yakni pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, seperti pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan. Selain itu pembangunan berbagai sarana prasarana pengelolaan air limbah seperti septi tank komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK) serta instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT). "Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial budaya maupun pelatihan keterampilan kerja dan sosialisasi guna peningkatan kapasitas,"

2. Saran

Perlu ada kerangka kerja yang jelas tentang kepastian bermukim. Seringkali masyarakat permukiman kumuh menghadapi berbagai hambatan untuk memiliki atau memperoleh kejelasan hak atas tanah dan hak atas hunian yang layak. Pasar tanah pada umumnya agak disfungsi, peraturan yang ada menyulitkan pemerintah daerah untuk mencari tanah terjangkau dan berada di lokasi yang strategis bagi penghuni permukiman kumuh yang padat. Pengendalian tanah seringkali terkait dengan kekuatan politik dan korupsi, sehingga menyulitkan memperoleh informasi tentang penguasaan dan kepemilikan tanah, penggunaan dan ketersediaan tanah.

Diperlukan sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan rencana pemeliharaan. Aturan Bersama di tingkat masyarakat yang dibuat sangat diharapkan dimulai dari basis terkecil, agar masyarakat bersepakat menjaga lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga mampu menekan laju kekumuhan. Menuju Kotaku dengan semangat keberagaman dalam kebersamaan, serta semangat memiliki dalam pemeliharaan, dengan selalu mendorong kolaborasi dan partisipasi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 1989. Ekonomi Perkotaan. Fakultas Pasca-sarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Amiruddin. 1970. Pedoman Standar Minimum untuk Perencanaan Perumahan Rakyat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro, R. ;: 1984. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Blaag, W. 1986. Perencanaan Pembangunan Permukiman. PT. Garamedia, Jakarta.
- Budihardjo. 1984. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota.. Alumni, Bandung.
- Canter, L. W. 1977. Environmental Impact Assessment. University of Oklahoma, Norman.
- Hariato. 1987. Perumahan Rakyat. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Hidayat, A. 1986. Pedoman Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Hurlock. E. B. 1972. Child Development. licBraw Hill Kogakusha, Tokyo.
- Kusnopranoto. 1985. Kesehatan Lingkungan. Penerbit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.
- McAndrew. 1983. Permukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mochtar. 1989. Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota. Yayasan Penyelidikan Masalah Bangunan, Jakarta.

- Reksohadiprodjo. 1984. Perumahan dan Kebutuhan Hidup Hanusia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, E. 1985. Ekologi Kota. Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- 1987. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES, Jakarta.
- Soemadi. 1990. Kebijakan Pembangunan Pemukiman di Perkotaan dan Peremajaan Pemukiman Kumuh Kantor Menteri Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Soeriaatmadja, R. 1985. Butir-Butir Tata Lingkungan. Bina Aksara, Jakarta.
- Soemarwoto, Q. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Suparlan. 1986. Permukiman dan Pembangunan. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Suwahyo. 1990. Kotamadya Ujung Pandang Menuju Kota Bersinar. Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Ujung Pandang.
- Suratmo, G. 1988. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 6ajah Mada UniversityPress, Yogyakarta.
- Umar, A. 1986. Aspek Kesehatan Penyediaan Air Minum Lephass Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- 1990. Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap Kesehatan Masyarakat, Ujung Pandang.
- Wasito, S. 1989. Dampak Perbaikan Air Minum Pada Kesehatan Anak. Tinjauan dari Segi Kejadian Diare dan Hubungannya dengan Kebiasaan Membuang Kotoran dan Sampah. Bulletin Kesehatan, Vo. 16, Jakarta.
- Zen, M. 1982. Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. PT. Gramedia, Jakarta.